

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan pendidikan nasional ditujukan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia khususnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga akan menjadi bangsa yang beradab dan dapat bersaing di dunia Internasional. Dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dinyatakan bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
(Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003: 3)

Implementasi dari Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan, diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (RI) No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar pendidik

dan tenaga kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar penilaian Pendidikan. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 Tentang standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa :” Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat”.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mewujudkan fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat guna meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik maka diperlukan proses pelaksanaan dari delapan standar nasional pendidikan.

Pendidikan merupakan aspek penting bagi pengembangan sumber daya manusia, sebab pendidikan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk membebaskan manusia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Mu’Arif (2007 : 4) menyatakan bahwa :”Pendidikan merupakan jalur paling strategis untuk mengentaskan problem terbesar bangsa ini, yakni kemiskinan dan kebodohan”. Pendidikan merupakan salah satu kebijakan yang paling efektif untuk mengentaskan seluruh problem sosial di Indonesia.

Sistem pendidikan di Indonesia selalu mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu. Pembaharuan pendidikan ini bertujuan untuk memasuki era globalisasi yang ditandai dengan gencarnya inovasi teknologi, sehingga menuntut adanya penyesuaian sistem pendidikan yang selaras dengan tuntutan

dunia kerja. Salah satu lembaga pada jalur pendidikan formal yang menyiapkan lulusannya memiliki keunggulan di dunia kerja, diantaranya melalui jalur pendidikan kejuruan.

Pendidikan kejuruan memiliki karakteristik yang berbeda dengan satuan pendidikan lainnya. Perbedaan tersebut dapat dikaji dari tujuan pendidikan, substansi pelajaran, tuntutan pendidikan dan lulusannya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dinyatakan bahwa :

Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 : 19)

Pernyataan tersebut sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas pasal 15 bahwa :” Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”. Berdasarkan dari tujuan pendidikan kejuruan tersebut mengandung makna bahwa pendidikan kejuruan di samping menyiapkan tenaga kerja yang profesional juga mempersiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan program kejuruan. Isjoni (2003 : 1) dekan di FKIP Universitas Riau (UNRI) menyatakan bahwa:”

Ada dua hal sebenarnya kelebihan dari pendidikan menengah kejuruan, pertama lulusan dari institusi ini dapat mengisi peluang kerja pada dunia usaha/industri, karena terkait dengan satu sertifikasi yang dimiliki oleh lulusannya melalui Uji Kemampuan Kompetensi. Dengan sertifikasi tersebut mereka mempunyai peluang untuk bekerja. Kedua, lulusan pendidikan menengah kejuruan dapat untuk

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sepanjang lulusan tersebut memenuhi persyaratan, baik nilai maupun program studi atau jurusan sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.

Pendidikan peserta didik dapat berjalan secara optimal sehingga mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi apabila didukung oleh faktor ekonomi yang memadai. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak peserta didik di kabupaten Wonogiri khususnya SMK berasal dari kalangan keluarga yang kondisi ekonominya menengah ke bawah. Kondisi ini dibuktikan dengan sulitnya mereka memenuhi kewajiban membayar biaya pendidikan untuk putra-putrinya. Sebagian besar orang tua dari peserta didik memiliki mata pencaharian sebagai perantau dikota-kota besar, buruh tani dan bahkan ada yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga penghasilan juga tidak menentu.

Kondisi ini jelas merupakan penghalang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karimah (2008 : 1) menyatakan bahwa :”Faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak tidak melanjutkan sekolah”. Hal senada juga disampaikan oleh Handoko (2009 : 1) bahwa :”Faktor ketidakmampuan membiayai sekolah atau faktor ekonomi menjadi faktor penyebab yang paling dominan putus sekolah”. Kenyataan ini dibuktikan dengan tingginya angka rakyat miskin di Indonesia yang anaknya tidak bersekolah atau putus sekolah karena tidak ada biaya.

Keadaan demikian juga dirasakan oleh sebagian besar orang tua peserta didik khususnya SMK di kabupaten Wonogiri, sehingga menyebabkan hanya sebagian kecil saja dari keluarga yang mengharapkan anaknya setelah

lulus dari SMK untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagian besar dari mereka berharap anaknya setelah lulus dari SMK akan segera bekerja untuk memperoleh penghasilan sendiri, hal tersebut merupakan alasan mereka sehingga orang tua lebih memilih anaknya bersekolah di SMK dibanding ke SMU. Harapan tersebut sesuai dengan program pemerintah Indonesia dalam dunia pendidikan, yaitu untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 70% dan 30% untuk SMU.

Mendiknas Bambang Sudibyo dalam sambutannya pada Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah Tahun 2009 mengatakan bahwa :”Kebijakan Depdiknas membalik dari 30 : 70 pada tahun 2004 menjadi 70 : 30 pada tahun 2015”. Perubahan jumlah sekolah ini terpicu data yang diperoleh di lapangan bahwa pengangguran produktif kebanyakan adalah lulusan SMU. Pada dasarnya SMU diprogram untuk mereka yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, sedangkan pembekalan *skill* (untuk SMU) sangat sedikit jika dibandingkan dengan SMK. Siswa SMK dituntut untuk menguasai skill serta diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. SMK dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dari segi keterampilan kerja, maka dari itu saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan lulusan dari SMK.

Dinas Pendidikan telah menganjurkan untuk lebih memilih SMK karena lebih menjanjikan dalam dunia kerja. Puspitasari (2008 : 11) menyatakan bahwa :”Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dirancang untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan

mampu mengembangkan sikap professional di bidang kejuruan”. Berdasarkan tujuan dari sekolah kejuruan tersebut maka dunia pendidikan mempunyai tanggung jawab yang besar agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang mengarah pada kemampuan untuk hidup mandiri.

Meningkatkan jumlah SMK juga akan menimbulkan persoalan baru. Lulusan SMK yang melimpah membawa persoalan terhadap kesempatan kerja, sebab dimungkinkan jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah lulusan. Di kabupaten Wonogiri berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan SMK tahun 2008 jumlah SMK ada 30 sekolah baik negeri maupun swasta dari berbagai program keahlian. Dari jumlah tersebut berdasarkan laporan dari Pusat Informasi Data Pendidikan Kab. Wonogiri (2008 : 1) disebutkan bahwa Hasil Ujian Nasional Tingkat SMA, MA, SMK Tahun Pelajaran 2007/2008 se Kabupaten Wonogiri diumumkan hasil kelulusan sebagai berikut :

- a. UN SMA, peserta 3079, lulus 3073 (99,18%), tidak lulus 25 (0,72%)
- b. UN SMK, peserta 4803, lulus 4792 (99,77%), tidak lulus 11 (0,23%)
- c. UN MA, peserta 203, lulus 200 (98,52%), tidak lulus (1,48%)

Informasi data tersebut menunjukkan bahwa jumlah lulusan SMK di kabupaten Wonogiri sangat besar dibandingkan SMA dan MA. Keadaan tersebut akan menjadi persoalan baru apalagi kabupaten Wonogiri bukan termasuk daerah industri yang tentunya akan sulit menampung lulusan SMK yang begitu banyak. Kenyataan tersebut masih ditambah lagi diantaranya banyak orang tua dan peserta didik yang memiliki pola pikir, tertanam suatu

harapan atau cita-cita untuk menjadi pegawai atau karyawan setelah lulus sekolah, menginginkan untuk mencari pekerjaan dengan bekal ijazah yang dimiliki dari bangku SMK, bukan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kasmir (2006 : 1) menyatakan bahwa : "Orientasi para mahasiswa setelah lulus hanya untuk mencari kerja, bukan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri". Cita-cita seperti itu sudah berlangsung lama sehingga tidak mengherankan jika jumlah orang menganggur setiap tahun terus bertambah. Suharyadi (2007 : 3) menyatakan bahwa :

Sebagian orang lebih tertarik untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil walaupun mungkin awalnya gaji tidak terlalu besar, namun ada harapan menjadi pejabat dengan fasilitas yang memadai dan mendapatkan uang pensiun, sebagian orang tertarik untuk menjadi pegawai swasta profesional yang umumnya menjanjikan gaji yang besar, tunjangan dan fasilitas lain yang menarik, serta uang pesangon, hanya sebagian kecil yang tertarik untuk terjun menjadi pengusaha (wirausahawan), mungkin karena penghasilan tidak menentu, resiko terlalu besar dan alasan paling klasik yaitu tidak memiliki modal.

Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut maka perlu diciptakan suatu iklim yang dapat mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang tua, guru, dan peserta didik agar kelak anak-anak mereka dibiasakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri daripada mencari pekerjaan. Tidak sedikit yang merasa bahwa berwirausaha sama dengan tidak memiliki masa depan yang pasti, sementara itu dengan bekerja di perusahaan mereka yakin bahwa masa depan sudah pasti, apalagi menjadi pegawai negeri. Kondisi demikian menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, masyarakat dan dunia usaha agar kebijakan pemerintah untuk

menambah rasio perbandingan jumlah SMK dan SMA yaitu 70 : 30 tidak menimbulkan persoalan baru yaitu bertambahnya jumlah pengangguran.

Kondisi tersebut masih ditambah lagi adanya kenyataan di masyarakat bahwa terjadi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja, kondisi ekonomi orang tua yang rata-rata menengah ke bawah sehingga anak putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi namun tidak bisa bekerja mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang memadai, terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena krisis global, akan menimbulkan persoalan yang baru yaitu meningkatnya jumlah pengangguran. Nasution (2007 : 1) menyatakan bahwa :

Ada tiga faktor mendasar yang menjadi penyebab masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia adalah ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai dalam pendidikan dengan lapangan kerja, ketidakseimbangan demand (permintaan) dan supply (penawaran) dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan masih rendah.

Sektor pendidikan mempunyai peranan besar dalam menghasilkan output atau tamatan yang berkualitas dan terampil. Sektor industri membutuhkan tenaga kerja produktif yang dapat menghasilkan suatu produk atau jasa tertentu yang dapat bersaing di pasaran. Tuntutan sektor industri tersebut dapat terwujud apabila sistem pendidikan dapat berfungsi sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua WNI berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif

menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Muslich (2008 : 1)

menyatakan bahwa :

Pendidikan nasional sarat dengan tuntutan yang cukup mendasar karena harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka salah satu upaya yang segera dapat dilakukan adalah pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kerja sama antara SMK dan dunia usaha harus terus ditingkatkan dengan menyelaraskan antara tuntutan keahlian di dunia usaha dan kompetensi lulusan yang ada di SMK.

Lapangan kerja bagi lulusan SMK bukan semata-mata untuk menyerap tenaga kerja, tetapi juga diperlukan untuk tempat magang bagi peserta didik SMK. Hal ini terkait dengan pola pendidikan SMK yang menggunakan sistem ganda yaitu belajar di sekolah dan belajar di industri. Kenyataan yang terjadi masih ada peserta didik SMK di kabupaten Wonogiri yang melaksanakan praktek kerja industri (Prakerin) berebut tempat industri yang memang tidak sebanding dengan jumlah SMK, serta tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang sedang ditempuh di sekolah. Nurulhuda (2009 : 2) menyatakan bahwa:

Bila masalah lapangan kerja tidak teratasi, maka jumlah SMK yang banyak dengan jumlah lulusan yang melimpah justru akan menjadi bom waktu bagi meningkatnya jumlah pengangguran dan dampak dari semua itu adalah runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan SMK dan matinya pendidikan kejuruan.

Masalah lapangan kerja sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi bangsa, bila pertumbuhan ekonomi cepat dan besar maka lapangan kerja akan terbuka lebar sebaliknya bila pertumbuhan ekonomi kecil maka lapangan kerja sempit dan sedikit. Bila dilihat kondisi ekonomi sekarang, negara kita belum sembuh betul dari krisis ekonomi, sehingga nampak sekali banyak pengangguran.

Menurut data BPS Agustus 2009, jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 8,96 juta orang (7,87%) dari total angkatan kerja sekitar 113,83 juta orang. Dari jumlah 8,96 juta orang penganggur tersebut sebagian besar berada di pedesaan. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan para penganggur berdasarkan data BPS Pebruari 2009 sebesar 27,09% berpendidikan SD ke bawah, 22,62% berpendidikan SLTP, 25,29% berpendidikan SMA, 15,37% berpendidikan SMK dan 9,63% berpendidikan Diploma sampai Sarjana.

Berdasarkan berbagai realita tersebut di atas maka sistem pembelajaran di SMK membagi mata pelajaran menjadi kelompok normatif, adaptif dan kelompok produktif sesuai dengan program keahlian masing-masing. Mata pelajaran kewirausahaan sesuai dengan struktur kurikulum SMK/MAK yang tertuang dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi termasuk di dalam kelompok adaptif mata pelajaran kejuruan yang mempunyai durasi waktu 192 jam/2 jam tatap muka setiap minggu untuk setiap tingkat X, XI dan XII.

Pemberian mata pelajaran kewirausahaan di SMK ini dimaksudkan untuk mengubah pola pikir peserta didik sehingga di masa mendatang lahir

para lulusan yang mempunyai pandangan positif terhadap wirausaha, memiliki wawasan bahwa wirausaha merupakan salah satu lapangan kerja yang terhormat sejajar dengan profesi sebagai pegawai/karyawan, serta diharapkan dimasa yang akan datang lahir wirausahawan yang tangguh dan mampu berinovasi sebagai bekal untuk hidup mandiri.

Standar Kompetensi (SK) mata pelajaran kewirausahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.23 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah sebagai berikut :

1. Mampu mengidentifikasi kegiatan dan peluang usaha dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi di lingkungan masyarakatnya.
2. Menerapkan sikap dan perilaku wirausaha dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakatnya.
3. Memahami sendi-sendi kepemimpinan dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta menerapkan perilaku kerja prestatif dalam kehidupannya.
4. Mampu merencanakan sekaligus mengelola usaha kecil/mikro dalam bidangnya.
(Permendiknas No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan)

Dari Standar Kompetensi Lulusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran kewirausahaan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan dalam memahami peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha, menerapkan perilaku kerja prestatif dalam kehidupannya dan mampu berwirausaha dalam bidangnya.

Pembelajaran kewirausahaan harus dapat menghasilkan perilaku wirausaha dan jiwa kepemimpinan pada peserta didik. Dengan bekal itu mereka diharapkan dapat mengelola usaha dan berusaha secara mandiri.

Tujuan pemberian mata pelajaran kewirausahaan tersebut dapat tercapai apabila guru kewirausahaan mempunyai berbagai metode maupun sistem pembelajaran yang beragam untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Materi ini tidak terfokus kepada teori, tetapi lebih pada aplikasi praktik yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Mulai dari tingkat X sampai tingkat XII banyak materi yang mengharuskan siswa SMK bersentuhan dengan aplikasi praktik secara nyata, baik berkelompok maupun individu.

Pengelolaan pembelajaran kewirausahaan dibutuhkan kemampuan guru dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang ada di dalam ruang lingkup kurikulum adaptif kewirausahaan. Guru memberikan uraian singkat dengan contoh nyata, peserta didik dapat langsung praktik baik di internal sekolah maupun eksternal. Penerapan pembelajaran dengan metode aplikasi praktik, akan terlihat bagi peserta didik yang memiliki jiwa kewirausahaan mumpuni, setelah jam praktik habis cenderung masih ingin tetap menjalankan kegiatan tersebut, sebab hasilnya dapat menambah uang saku, dan jika berlanjut sampai peserta didik tersebut lulus dapat dipakai sebagai pegangan untuk hidup mandiri.

Sistem pembelajaran untuk penanaman sikap dan jiwa kewirausahaan diperlukan kemampuan guru, baik dalam memberikan contoh langsung maupun jenis praktik yang akan dicobakan. Selain itu pemberian penghargaan kepada peserta didik yang berhasil perlu diperhatikan dan sekaligus sebagai bahan evaluasi peserta didik.

Proses pembelajaran kewirausahaan yang interaktif dapat terjadi apabila guru dan peserta didik terjalin hubungan yang aktif dua arah dengan sejumlah pengetahuan sebagai mediumnya, sehingga interaksi itu merupakan hubungan yang bermakna dan kreatif serta dapat mewujudkan arah dan tujuan pembelajaran kewirausahaan yaitu untuk membentuk peserta didik sebagai individu yang mampu menciptakan pekerjaan dan bukan lagi sebagai pencari pekerjaan dengan berwirausaha.

Berdasarkan dari realita serta pemikiran-pemikiran di atas menarik untuk mengetahui pengelolaan pembelajaran kewirausahaan di SMK Sudirman I Wonogiri untuk mencapai kemandirian peserta didik dalam menciptakan lapangan kerja.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat disampaikan fokus dalam penelitian ini adalah bagaimanakah ciri-ciri pengelolaan pembelajaran berbasis kewirausahaan di SMK Sudirman 1 Wonogiri? Selanjutnya fokus tersebut dijabarkan dalam tiga sub fokus.

1. Bagaimanakah ciri-ciri pengembangan materi mata pelajaran kewirausahaan di SMK Sudirman 1 Wonogiri?
2. Bagaimanakah ciri-ciri interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran kewirausahaan di SMK Sudirman 1 Wonogiri ?
3. Bagaimanakah ciri-ciri evaluasi pembelajaran kewirausahaan di SMK Sudirman 1 Wonogiri ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan membahas tiga hal penting, sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan ciri-ciri pengembangan materi mata pelajaran kewirausahaan di SMK Sudirman 1 Wonogiri.
2. Mendeskripsikan ciri-ciri interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran kewirausahaan di SMK Sudirman 1 Wonogiri.
3. Mendeskripsikan ciri-ciri evaluasi pembelajaran kewirausahaan di SMK Sudirman 1 Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat di dunia pendidikan.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat kita peroleh dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan berkenaan dengan pengelolaan pembelajaran kewirausahaan khususnya sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di suatu sekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi siswa

Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat bagi siswa untuk menciptakan lapangan kerja sendiri sebagai bekal untuk hidup mandiri.

b. Bagi guru

Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat bagi guru sebagai pertimbangan dan masukan dalam meningkatkan kemampuan untuk mengelola pembelajaran kewirausahaan khususnya, sehingga tercapai arah dan tujuan pembelajaran yang tepat.

c. Bagi sekolah

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi kepala sekolah dan seluruh staf dalam menyikapi pentingnya pengelolaan pembelajaran kewirausahaan.

E. Definisi Istilah

1. Pengelolaan Pembelajaran

Pengelolaan pembelajaran adalah suatu cara mengelola proses pembelajaran guna mencapai hasil yang maksimum dengan mendayagunakan sumber daya yang tersedia.

2. Pengembangan Materi Kewirausahaan

Pengembangan materi kewirausahaan adalah kegiatan memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan tentang kewirausahaan yang telah ada, meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan.

3. Interaksi Pembelajaran

Interaksi pembelajaran adalah hubungan timbal balik antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan sejumlah pengetahuan sebagai mediumnya, sehingga interaksi itu merupakan hubungan yang bermakna dan kreatif untuk mencapai tujuan pendidikan.

4. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan untuk mengetahui daya serap peserta didik terhadap materi ajar yang diberikan, sehingga dapat dibedakan antara peserta didik yang mengalami keberhasilan dan kegagalan dalam belajar.